

Judul : Hibah kapal patroli Jepang, Komisi I: sesuai kebutuhan TNI AL
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Hibah Kapal Patroli Jepang Komisi I: Sesuai Kebutuhan TNI AL

FOTO TEDY RMI



Nurul Arifin

ANGGOTA Komisi I DPR Nurul Arifin menilai hibah kapal patroli dari Jepang memberi keuntungan untuk memperkuat keamanan laut Indonesia. Kapal ini sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah perairan dan kompleksitas ancaman.

Nurul menyebut, hibah kapal patroli senilai lebih dari Rp 200 miliar itu jadi tambahan penting bagi TNI Angkatan Laut (AL). Kapal dengan karakter cepat dan lincah itu sangat relevan untuk kebutuhan patroli rutin, sekaligus meningkatkan kemampuan respons TNI AL terhadap ancaman yang bersifat cepat dan dinamis.

"Kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis," kata politikus Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dia bilang, kehadiran kapal patroli hibah akan memperkuat kehadiran negara di wilayah laut yang selama ini rawan terhadap berbagai pelanggaran. Mulai dari penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, hingga penyusupan kapal asing. "Kapal itu efektif mendukung pelaksanaan tugas AL menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut

NKRI," katanya.

Namun dia mengingatkan, manfaat hibah itu harus diimbangi dengan kesiapan jangka panjang. Perawatan berkelanjutan, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan sumber daya manusia jadi hal penting, agar kapal patroli dapat dioperasikan secara optimal dalam jangka waktu lama.

"Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita," katanya.

Dari sisi ekonomi, dia menilai hibah kapal patroli ini juga memberikan efisiensi anggaran karena mengurangi kebutuhan pengadaan alutsista baru. Sementara dalam konteks politik luar negeri, kerja sama dengan Jepang tetap harus ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Nurul juga meminta Pemerintah dan TNI menjadikan hibah tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri. Dengan pengelolaan yang tepat, bantuan itu bisa menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia. "Sekaligus mempererat kerja sama bilateral kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan," katanya.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menambahkan, seluruh mekanisme persetujuan hibah telah dipenuhi dan disepakati oleh semua fraksi di DPR. Kendati demikian, Senayan tetap memberi perhatian agar hibah tersebut tidak bersifat mengikat atau berdampak pada upaya negara asing untuk mendikte kebijakan Indonesia.

"Kita underline adalah, jangan sampai bantuan ini mendikte. Jepang adalah sahabat lama kita," jelas legislator PDIP itu. ■ PYB